

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Liberalisasi perdagangan di sektor pertanian merupakan sebuah kebijakan yang telah mulai diterapkan sejak era General Agreement on Trade and Tarriff (GATT) hingga sekarang berubah menjadi World Trade Organization (WTO), menjadikan kaum petani terdiskriminasi oleh kebijakan liberalisasi yang sama sekali tidak memihak kepada kepentingan petani. Hal tersebut bisa terjadi karena ratifikasi liberalisasi perdagangan pada sektor pertanian dengan aturan-aturan seperti penghapusan tarif, politik *dumping*, mutasi genetik benih pangan, hak paten benih oleh perusahaan agribisnis. Dalam banyak kasus, mekanisme Agreement on Agriculture (AOA) sebagai bagian dari liberalisasi pertanian yang tertuang dalam WTO justru membuat kebanyakan negara-negara berkembang kehilangan kendalinya atas pengelolaan pertanian bahkan tak jarang mereka dipaksa untuk membuka seluas-luasnya pasar domestiknya dan menghilangkan subsidi pertanian (sebagai hambatan non-tarif) dalam perdagangan global, sementara negara-negara maju justru bersikap sangat protektif terhadap produksi pertanian dalam negerinya.<sup>1</sup>

Akibat munculnya tekanan dan ancaman yang dirasakan oleh kaum petani tersebut, akhirnya sekelompok perwakilan petani dari empat benua (Asia, Afrika, Eropa, Amerika) memutuskan untuk mendirikan sebuah organisasi petani global yang kemudian bernama La Via Campesina (LVC) yang berarti “Jalan Petani” pada

---

<sup>1</sup> Adi Joko Purwanto, ”Perjuangan Kelompok Tani Internasional dalam Melawan Program Liberalisasi Pertanian Global”, Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional Unwahas, Vol. 12, No. 2, Juli 2012, 2-3

tahun 1993 di Mons, Belgia. Awal mula munculnya ide pembentukan LVC tersebut terjadi pada saat diadakannya pertemuan para pemimpin petani dari Amerika Tengah, Kepulauan Karibia, Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada yang diselenggarakan di Managua, Nikaragua, pada bulan April 1992. Pada pertemuan tersebut, mereka mengidentifikasi adanya kebijakan neoliberal yang diberlakukan oleh International Financial Institutions (IFIs), dan liberalisasi perdagangan yang juga diberlakukan oleh GATT yang akan membawa petani ke ambang kepunahan.<sup>2</sup>

LVC merupakan sebuah organisasi gerakan sosial yang menyatukan organisasi petani skala kecil dan menengah, wanita pedesaan, pekerja tani, masyarakat pribumi agraris di Asia, Amerika, Eropa Barat dan Eropa Timur, dan Afrika.<sup>3</sup> Hingga tahun 2020 anggota LVC tercatat berjumlah 182 organisasi lokal dan nasional yang tersebar di 81 negara dari Benua Afrika, Asia, Eropa dan Amerika, dan juga merepresentasikan sekitar 200 juta petani di seluruh dunia.<sup>4</sup> Tujuan dari didirikannya LVC adalah untuk menciptakan perubahan yang meningkatkan kesejahteraan hidup di pedesaan, meningkatkan produksi pangan untuk konsumsi lokal, dan membuka perubahan ruang demokratis yang membawa pemberdayaan masyarakat pedesaan menuju peran, posisi dan bagian yang besar dalam pembuatan kebijakan pada isu-isu tertentu yang mempengaruhi kehidupan mereka.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Peter Rosset, "Re-Thinking Agrarian Reform, Land and Territory in La Via Campesina", *The Journal of Peasant Studies*, Vol. 40, No. 4, 2013, 723

<sup>3</sup> Annette-Aurelie Desmarais, "The Via Campesina: Consolidating an International Peasant and Farm Movement", *The Journal of Peasant Studies*, Vol. 29, No. 2, 2002, 94

<sup>4</sup> La Via Campesina "The International Peasant's Voice" diakses melalui <https://viacampesina.org/en/international-peasants-voice/>, Pada 18 November 2019

<sup>5</sup> Anette Aurelie Desmarais "Ringkasan Sejarah La Via Campesina", diakses melalui <https://spi.or.id/ringkasan-sejarah-la-via-campesina/>, Pada 26 November 2019

Melihat banyaknya isu pelanggaran terhadap hak-hak petani yang terjadi pasca kebijakan liberalisasi perdagangan pada sektor pangan membuat LVC mencoba untuk menyusun sebuah deklarasi yang mengakui dan melindungi hak-hak dasar petani secara hukum. LVC berinisiatif untuk membentuk deklarasi hak-hak petani sebagai bagian dalam instrument Hak Asasi Manusia (HAM) yang baru karena Instrumen HAM yang lama seperti Deklarasi Universal HAM PBB, Konvensi Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR), Piagam Petani 1979, Protokol Cartagena, Konvensi ILO 169, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966, dan Human Rights to Food dari Dewan HAM PBB dianggap masih belum cukup untuk menjamin dan melindungi hak-hak petani sepenuhnya. Khususnya bagi kelompok-kelompok seperti pengembala, nelayan, buruh tani, petani tidak bertanah, pemburu, penyewa lahan, dan petani perempuan, padahal mereka adalah korban utama dari kebijakan neo-liberal.<sup>6</sup>

Perumusan ide hak-hak petani oleh LVC telah dimulai sejak tahun 2001. Dimulai dari Konferensi Cibubur yang diadakan oleh Serikat Petani Indonesia (SPI) yang juga merupakan anggota dari LVC dan kemudian membawa rumusan hak-hak petani tersebut ke rapat regional LVC Asia tenggara dan Asia Timur. Hingga kemudian menyadarkan anggota LVC di seluruh dunia bahwa pelanggaran hak-hak mendasar petani juga terjadi di seluruh dunia. LVC dengan bekerja sama dengan Food First Information and Action Network (FIAN), beserta Centre Europe-Tiers Monde (CETIM) kemudian mulai untuk membuat laporan terkait pelanggaran-pelanggaran hak-hak petani yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan HAM

---

<sup>6</sup> Christophe Golay, “*Legal reflections on the rights of peasants and other people working in rural areas*”, Geneva Academy, 2013, 4

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2004, 2006, dan 2008.<sup>7</sup> Kerangka awal hak petani yang dirancang LVC meliputi hak atas tanah dan wilayah, hak atas alat produksi pertanian, kebebasan untuk menentukan harga dan pasar untuk produksi pertanian, hak untuk perlindungan nilai-nilai pertanian, dan hak atas keanekaragaman hayati.<sup>8</sup>

Krisis pangan global yang terjadi pada tahun 2007-2008 menjadi momentum bagi LVC untuk mengkampanyekan hak-hak petani. Krisis pangan global tersebut telah menunjukkan kegagalan dari sistem pertanian dan pangan global saat ini, yang dicirikan dengan penguasaan oleh korporasi besar, industri pertanian monokultur yang ekstraktif dan tidak ramah lingkungan dan juga telah melanggar hak-hak fundamental petani dan orang yang bekerja di pedesaan. Menyikapi krisis pangan global tersebut, Majelis Umum PBB di New York dan Dewan HAM PBB di Jenewa membentuk “High-Level Panel on the Global Food Crisis and the Right to Food” dimana LVC diminta untuk segera bersama pelaku penting lainnya menilik krisis pangan dan membangun kerangka hak asasi manusia. LVC menjawab bahwa hak-hak petani adalah hal yang dibutuhkan dalam perang melawan kelaparan dan diskriminasi terhadap penduduk pedesaan di seluruh dunia. Perlindungan hak-hak petani ini secara langsung membangun perlindungan pangan dunia, perlindungan sumber daya penting untuk semua, dan perlindungan sistem pangan yang berkeadilan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Buklet Serikat Petani Indonesia “Sejarah Kelahiran Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Petani dan Orang yang Bekerja di Pedesaan”, 2019, 2-3

<sup>8</sup> Priscilla Claeys, “Food Sovereignty and the Recognition of New Rights for Peasants at the UN: A Critical Overview of La Via Campesina’s Rights Claims over the Last 20 Years”, *Globalizations*, Vol. 12, No. 4, 2015, 458

<sup>9</sup> Buklet Serikat Petani Indonesia, 2019, 6-7

Pejuangan LVC dalam mewujudkan ratifikasi hak-hak petani tidaklah mudah. Pada tahun 2011 saat diadakannya pertemuan Food and Agriculture Organization (FAO) dan PBB yang juga dihadiri oleh LVC, sempat menuai perdebatan antara LVC dan FAO. LVC sempat menolak program Food Security yang diusulkan oleh FAO untuk mengatasi krisis pangan. Menurut LVC, program *Food Security* yang ditawarkan oleh FAO tidak mengatur proses produksi yang melibatkan petani kecil dan cenderung hanya akan menguntungkan perusahaan agribisnis. Program *Food Security* dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pertanian masyarakat lokal dan bertolak belakang dengan isi Deklarasi yang diajukan LVC sebagai solusi untuk mengatasi krisis pangan global.<sup>10</sup>

Pada bulan Maret 2012, Badan Penasihat Dewan HAM PBB melakukan studi tentang diskriminasi hak-hak petani dalam konteks hak atas pangan. Badan Penasihat ini kemudian mempresentasikan studi lebih lanjut tentang pemajuan hak-hak petani. Komite Penasihat akhirnya merekomendasikan agar Dewan HAM PBB untuk membentuk kelompok kerja antar negara untuk menegosiasikan dan memfinalisasi sebuah Deklarasi PBB yang mengatur tentang hak-hak petani dan masyarakat yang bekerja di pedesaan.<sup>11</sup>

Pada tanggal 17 Desember 2018 akhirnya Majelis Umum PBB secara resmi telah mengesahkan Deklarasi tentang Hak Petani dan Orang yang Bekerja di Pedesaan (United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in the Rural Areas – UNDROP) sebagai bagian dari instrumen HAM

---

<sup>10</sup> “La Via Campesina, Report No.4”, dalam <http://viacampesina.org/downloads/pdf/en/report-no.4-EN-2012-comp.pdf>, diakses pada 4 Maret 2021

<sup>11</sup> Buklet Serikat Petani Indonesia, 2019, 6-7

melalui resolusi 73/165. Tercatat sebanyak 121 negara menyatakan setuju dengan keputusan tersebut, 8 negara menolak, dan 54 abstain. Sebelumnya, usulan pengesahan UNDROP sendiri sudah diadopsi terlebih dahulu oleh Dewan HAM PBB di Jenewa pada tanggal 28 September 2018 melalui resolusi A/HRC/RES/39/12.<sup>12</sup>

Keberhasilan yang didapatkan oleh LVC dalam mewujudkan ratifikasi UNDROP oleh PBB menjadi sebuah persoalan yang menarik untuk dibahas dalam penelitian kali ini karena sejak berdirinya LVC memiliki tujuan untuk mensejahterakan petani dari kebijakan neoliberal. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memperjuangkan deklarasi PBB tentang Hak Petani dan pada tahun 2018 yang lalu LVC pada akhirnya berhasil mencapai kepentingannya dengan adanya ratifikasi UNDROP. Dengan demikian, dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk menjelaskan faktor-faktor penentu keberhasilan gerakan sosial dilakukan LVC sehingga berhasil mewujudkan ratifikasi UNDROP.

## 1.2 Rumusan Masalah

Selama lebih dari satu dekade LVC telah memperjuangkan terbentuknya deklarasi PBB tentang pengakuan terhadap hak-hak petani. Perjuangan LVC dilatar belakangi oleh diskriminasi dan marjinalisasi yang dirasakan oleh kaum petani di seluruh dunia. Pada akhirnya gerakan yang dilakukan oleh LVC mencapai keberhasilannya karena pada tanggal 17 Desember 2018 Majelis Umum PBB secara sah telah meratifikasi UNDROP dengan hasil Voting 121 negara setuju, 8 negara menolak, dan 54 negara abstain. Keberhasilan LVC menjadi persoalan yang

---

<sup>12</sup> Buklet Serikat Petani Indonesia, 2019, 2-3

menarik untuk diteliti karena LVC merupakan salah satu aktor non-negara, namun LVC mampu untuk mempengaruhi Majelis Umum PBB untuk meratifikasi UNDROP.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dijelaskan diatas, peneliti kemudian menarik pertanyaan penelitian sebagai berikut: “Apa Saja Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Gerakan LVC dalam Mewujudkan Ratifikasi UNDROP”

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis apa saja faktor-faktor penentu keberhasilan LVC dalam mewujudkan ratifikasi UNDROP.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Akademis**

Diharapkan nantinya penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa, terutama mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional khususnya dalam konteks masyarakat sipil global atau gerakan sosial, serta mengetahui apa saja faktor-faktor penentu keberhasilan LVC dalam mewujudkan ratifikasi UNDROP.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca terutama mahasiswa hubungan internasional dalam memahami apa saja faktor-faktor penentu keberhasilan LVC dalam mewujudkan ratifikasi UNDROP.



Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat luas untuk memahami lebih baik terkait Hak Petani dan Masyarakat yang Bekerja di Pedesaan.

## 1.6 Studi Pustaka

Dalam menjelaskan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian sebelumnya untuk dijadikan sebagai kerangka berpikir dalam menganalisis penelitian ini. Penelitian-penelitian sebelumnya dijadikan tolak ukur dan landasan bagi peneliti dalam mengembangkan ruang lingkup penelitian. Pertama yaitu sebuah artikel jurnal dari Adi Joko Purwanto yang berjudul "*Perjuangan Kelompok Tani Internasional dalam Melawan Program Liberalisasi Pertanian Global*". Tulisan ini menjelaskan tentang bagaimana perlawanan kelompok tani internasional (La Via Campesina) terhadap program liberalisasi pertanian global (WTO). Dalam tulisan ini juga memuat tentang perjuangan petani sebelum hingga sesudah terbentuknya LVC dalam hal menentang liberalisasi pangan.

Menurut Adi Joko Purwanto, liberalisasi pertanian yang dicanangkan oleh WTO dianggap merugikan petani-petani di negara berkembang. Dengan adanya kebijakan liberalisasi sektor pertanian maka produk-produk pertanian dari negara berkembang akan kalah bersaing dengan produk pertanian negara maju, hal ini disebabkan oleh pengaruh teknologi, luas lahan dan modal dari negara berkembang cukup rendah. Sejak dihari terbentuknya, LVC kerap melakukan tuntutan terhadap lembaga-lembaga internasional seperti International Monetary Fund (IMF), World Bank, WTO, PBB, dll. Salah satu tuntutannya yaitu menuntut agar WTO keluar

dari masalah pertanian dan membiarkan masalah pertanian untuk diurus oleh petani lokal.<sup>13</sup>

Melalui tulisan Adi Joko Purwanto, peneliti menemukan perbedaan pembahasan antara tulisan Adi Joko Purwanto dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Tulisan Adi Joko Puwanto lebih menjelaskan terkait pergerakan LVC dalam menentang segala bentuk liberalisasi pertanian yang di canangkan oleh WTO. Sedangkan dalam penelitian kali ini, peneliti menjelaskan tentang faktor-faktor penentu keberhasilan dari LVC dalam mewujudkan ratifikasi deklarasi UNDROP pada tahun 2018.

Kedua, merupakan sebuah artikel jurnal yang ditulis oleh Saturnino M. Borrás JR yang berjudul “*La Via Campesina and its Global Campaign for Agrarian Reform*”. Artikel jurnal ini menjelaskan tentang bagaimana kemunculan dari Global Campaign for Agrarian Reform (GCAR) yang dipimpin oleh LVC sehingga dapat mempengaruhi perdebatan tentang reforma pertanahan secara global. Artikel jurnal ini juga menjelaskan tentang proses yang dilalui oleh LVC untuk menjadikan reforma agraria menjadi isu yang dibahas pada level internasional. Menurut Borrás, munculnya GCAR melibatkan lima proses yang saling terkait (1) eksternalisasi dengan cepat isu nasional-lokal, (2) membentuk sekutu transnasional, (3) membentuk kerangka dan target yang sama, (4) terbukanya komunikasi lintas batas dan transportasi yang lebih cepat dan lebih murah, (5) peningkatan otonomi dan kapasitas untuk menggabungkan berbagai bentuk tindakan kolektif.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Adi Joko Purwanto, 2012, 9-10

<sup>14</sup> Saturnino M. Borrás Jr, “*La Via Campesina and its Global Campaign for Agrarian Reform*”, *Journal of Agrarian Change*, Vol. 8, No. 2&3, 2008, 262

Melalui artikel jurnal dari Saturnino M. Borrás Jr, peneliti menemukan perbedaan antara penelitian yang dilakukan peneliti dengan tulisan dari Borrás. Tulisan dari Saturnino M. Borrás ini lebih menjelaskan tentang upaya yang dilakukan oleh LVC untuk mempengaruhi kebijakan reforma agraria pada level internasional melalui kampanye reforma agraria secara global. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti lebih berfokus kepada faktor-faktor penentu keberhasilan gerakan LVC dalam mewujudkan ratifikasi UNDROP.

Ketiga, merupakan sebuah artikel jurnal yang ditulis oleh Maria Elena Martínez-Torres, dan Peter M. Rosset yang berjudul "*La Via Campesina: The Birth and Evolution of a Transnational Social Movement*". Artikel jurnal ini menjelaskan tentang mengapa LVC dikatakan sebagai sebuah gerakan sosial transnasional. Jurnal ini juga menjelaskan tentang bagaimana asal usul dan evolusi gerakan petani transnasional (LVC) yang terdiri dari lima fase.

Fase pertama (1980-an hingga 1992) Gerakan petani pertama kali muncul sebagai sebuah organisasi yang otonom di Amerika Latin dan kemudian mulai meluas dalam skala global. Fase kedua (1992-1999) ditandai dengan adanya konsolidasi antar organisasi petani benua di Amerika Latin, kemudian terbentuknya LVC sebagai sebuah gerakan global. Fase ketiga (2000-2003) LVC tetap konsisten untuk menjadi aktor utama dalam panggung internasional untuk berbicara mengenai isu pedesaan. Fase keempat (2004-2008) melakukan penguatan secara



internal. Fase kelima (2008-2010) gerakan ini merespon isu-isu terbaru di dunia dan mencerminkan analisis ekonomi politik yang matang.<sup>15</sup>

Melalui artikel jurnal ini, peneliti menemukan perbedaan antara artikel jurnal ini dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Artikel jurnal yang ditulis oleh Maria Elena Martinez-Torres, dan Peter M. Rosset ini lebih menjelaskan kepada asal usul terbentuknya LVC sebagai sebuah gerakan sosial transnasional dan sama sekali tidak membahas tentang isu UNDROP. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menjelaskan terkait faktor-faktor penentu keberhasilan LVC dalam mewujudkan ratifikasi UNDROP. Meskipun demikian, peneliti menemukan penjelasan yang bermanfaat dari tulisan Maria Elena Martinez-Torres, dan Peter M. Rosset ini yaitu penjelasan terkait asal usul LVC dan fokus isu yang dibawa oleh LVC.

Studi pustaka peneliti yang keempat adalah sebuah artikel jurnal dari Peter Rosset yang berjudul “*Re-Thinking Agrarian Reform, Land and Territory in La Via Campesina*”. Artikel jurnal ini menjelaskan tentang dinamika perjuangan LVC tentang reforma agraria. Peter Rosset juga menjelaskan bahwa suara “akar rumput” (*Grassroot Voice - GV*) sangat mempengaruhi dinamika perjuangan agraria oleh LVC. Dunia telah mengalami banyak perubahan sehingga perjuangan LVC terhadap reforma agraria, tanah dan wilayah juga mengalami perubahan.<sup>16</sup>

Melalui artikel jurnal dari Peter Rosset ini, peneliti menemukan perbedaan penelitian yang terletak pada isu yang diteliti. Artikel jurnal Peter Rosset ini

---

<sup>15</sup> Maria Elena Martinez-Torres, dan Peter M. Rosset, “*La Via Campesina: The Birth and Evolution of a Transnational Social Movement*” *The Journal of Peasant Studies*, Vol. 37, No. 1, January 2010, 151

<sup>16</sup> Peter Rosset, 2013, 726

meneliti tentang dinamika perubahan perjuangan LVC dalam reforma agraria, tanah dan wilayah, sedangkan pada penelitian kali ini peneliti mencoba menjelaskan tentang faktor-faktor penentu keberhasilan gerakan LVC dalam mewujudkan ratifikasi UNDROF. Meskipun demikian tulisan dari Peter Rosset ini tentunya sangat membantu penelitian kali ini karena peneliti menemukan pembahasan tentang perubahan perjuangan LVC dalam mewujudkan reforma agraria.

Studi pustaka peneliti yang kelima adalah sebuah artikel jurnal yang ditulis oleh Annette Aurelie Desmarais yang berjudul “*The Power of Peasants: Reflections on the Meanings of La Via Campesina*”. Artikel jurnal dari A.A. Desmarais ini menilai signifikansi gerakan petani internasional yaitu LVC secara sosial dan politik dengan menjelaskan tentang bagaimana perkembangan LVC dan prestasi gerakan yang telah diperoleh oleh LVC sejak didirikan pada tahun 1993. Signifikansi tersebut dinilai dengan pertanyaan apa yang telah dilakukan LVC untuk mengkampanyekan kepada kita tentang masalah petani, dan kaitan antara permasalahan di tingkat lokal dan global, dan bagaimana pertanian dapat membantu pembangunan.<sup>17</sup>

Menurut Desmarais, LVC telah memiliki beberapa pencapaian seperti telah berhasil untuk beraliansi dengan beberapa International non-Governmental Organization (INGO) dan membawa isu petani menjadi isu global. LVC juga telah membangun jaringan yang diberi nama *Agri-Trade Group* dan telah mengkampanyekan isu petani sebanyak dua kali. Kampanye pertama yaitu tentang Global Campaign for Agrarian Reform, dan kampanye kedua tentang International

---

<sup>17</sup> Annette Aurelie Desmarais, “*The Power of Peasants: Reflections on the Meanings of La Via Campesina*”, *Journal of Rural Studies* 24, 2008, 138–139

Seeds Campaign. Akibat dari hal tersebut, hingga saat ini LVC menjadi gerakan yang berpengaruh dan memainkan peran penting dalam gerakan keadilan global.<sup>18</sup>

Melalui artikel jurnal dari A.A. Desmarais ini, penulis menemukan perbedaan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis kali ini. Tulisan dari A.A. Desmarais lebih menjelaskan tentang signikansi dari LVC dalam mengkampanyekan tentang isu petani dan pancapaian-pencapaian yang telah diperoleh LVC sejak berdiri tahun 1993. Sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan menjelaskan keberhasilan LVC terhadap satu isu khusus yaitu tentang mewujudkan ratifikasi UNDROP pada tahun 2018 yang lalu. Meskipun demikian, artikel jurnal dari A.A. Desmarais sangat membantu peneliti untuk melakukan penelitian karena dari artikel jurnal tersebut penulis mendapatkan informasi tentang jaringan-jaringan yang dibentuk oleh LVC dengan beberapa INGO untuk mengefektifkan kampanya LVC tentang isu petani.

## **1.7 Kerangka Konseptual**

### **1.7.1 Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Gerakan Sosial**

Saat ini keilmuan hubungan internasional telah mengalami banyak perkembangan seiring dengan perkembangan zaman, seperti aktor-aktor dalam hubungan internasional hingga pendekatan-pendekatan dalam ilmu hubungan internasional. Perkembangan dalam politik internasional telah membawa pembaharuan dalam studi keilmuan hubungan internasional. Negara tidak lagi menjadi satu-satunya aktor dalam hubungan internasional, melainkan juga dapat

---

<sup>18</sup> Annette Aurelie Desmarais, 2008, 144

meliputi individu, kelompok masyarakat, organisasi internasional, dan perusahaan multinasional atau transnasional.

Organisasi internasional merupakan salah satu contoh aktor yang telah membawa banyak pengaruh dalam dinamika politik hubungan internasional. Seperti organisasi internasional non-pemerintah (INGO) yang telah mempengaruhi dinamika politik internasional dengan melakukan gerakan-gerakan yang kemudian dapat disebut sebagai bentuk gerakan sosial. Gerakan sosial menurut Macionis adalah suatu upaya yang diorganisasikan dan ditujukan untuk menciptakan perubahan sosial atau menghambat perubahan sosial.<sup>19</sup> Berdasarkan pendapat yang dinyatakan oleh Macionis tersebut, maka poin penting dari gerakan sosial adalah pertama, adanya aktifitas yang diorganisir, dan kedua, adanya tujuan untuk menolak atau menciptakan perubahan sosial. Gerakan sosial bisa bertujuan untuk memberikan perubahan pada level individu atau lebih luas lagi seperti kelompok atau bahkan masyarakat. Cara yang dipakai pun berbeda-beda, ada yang memakai cara-cara damai (*Peaceful Movements*) dimana mereka menentang penggunaan cara-cara kekerasan, dan ada pula yang memakai cara-cara kekerasan (*violent movements*).<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Macionis, 1999 ; 607, Dikutip dalam Oman Sukmana, “*Konsep dan Teori Gerakan Sosial*” Intrans Publishing, Malang, 2016, 14

<sup>20</sup> Donatella Della Porta dan Mario Diani, “*Social Movements and Introduction*” (second editions), Blackwell Publishing, New Jersey, 2006, 178.

Menurut Macionis terdapat empat tahapan dalam proses gerakan sosial, yakni:<sup>21</sup>

1) *Emergence* (Tahap Kemunculan).

Kemunculan gerakan sosial biasanya didorong oleh suatu persepsi bahwa ada sesuatu yang tidak seharusnya. Sehingga gerakan sosial memiliki tujuan untuk menciptakan suatu perubahan atau untuk menolak suatu perubahan.

2) *Coalescence* (Tahap Penggabungan)

Setelah tahap kemunculannya, suatu gerakan sosial harus mendefinisikan dirinya sebagai sebuah gerakan dan kemudian mengembangkan strategi untuk mempengaruhi publik. Selain itu, pemimpin harus dapat menentukan kebijakan, memutuskan suatu taktik, membangun moral, dan merekrut anggota baru. Pada tahap ini, kemungkinan gerakan dapat terlibat dalam sebuah aksi kolektif seperti demonstrasi untuk menarik perhatian media massa dan perhatian publik. Gerakan sosial juga dapat membentuk aliansi dengan organisasi yang lainnya untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan.

3) *Bureaucratization* (Tahap Birokratisasi)

Sebuah gerakan sosial harus haruslah memiliki sifat-sifat birokrasi agar dapat memiliki kekuatan politik. Dengan demikian, sebuah gerakan dapat menjadi lebih mapan dan ketergantungan terhadap sosok pemimpin akan sedikit berkurang karena masing-masing anggota dalam gerakan tersebut telah memiliki sifat-sifat birokrasi yang mumpuni sehingga tidak memberatkan lagi tugas pemimpin dalam gerakan.

---

<sup>21</sup> Macionis, 1999 ; 623, Dikutip dalam Oman Sukmana, 2016, 38-40

Apabila suatu gerakan tidak memiliki kesiapan anggota yang mumpuni, maka gerakan tersebut akan beresiko untuk hilang.

#### 4) *Decline* (Tahap Penurunan/Kemunduran)

Pada tahap ini, Macionis juga menjelaskan bahwa terdapat lima alasan mengapa suatu gerakan sosial dapat mengalami kemunduran, yakni;

- a) Suatu gerakan sosial mengalami kemunduran karena dianggap telah berhasil dalam mencapai tujuannya.
- b) Suatu gerakan sosial mengalami kegagalan karena adanya kelemahan atau pertentangan dalam internal organisasi.
- c) Suatu gerakan sosial mengalami kemunduran karena adanya kooptasi atas para pemimpin gerakan.
- d) Suatu gerakan sosial mengalami kemunduran karena adanya tekanan (*repression*), terutama dari pihak eksternal
- e) Suatu gerakan sosial mengalami kemunduran karena gerakan tersebut terbentuk ke dalam pengarusutamaan (*establishment withinmainstream*).

Terkait terciptanya keberhasilan dalam suatu gerakan sosial yang kemudian menjadi salah satu alasan dari kemunduran suatu gerakan sosial, Locher kemudian telah mengklasifikasikan lima faktor yang menjadi penentu keberhasilan dan kegagalan suatu gerakan sosial, yakni;<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> David A. Locher, "*Collective Behavior*", New Jersey, Prentice Hall, Tahun 2002, Hal. 271

### 1) Kepemimpinan yang Efektif

Keberhasilan dalam suatu gerakan sosial dapat dicapai apabila dalam gerakan tersebut memiliki *effective leaders*, yaitu orang-orang yang memahami sistem hukum dan politik yang berfungsi efektif dalam gerakan tersebut. Para pemimpin dalam gerakan sosial tersebut harus memusatkan perhatian kepada tugas-tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari gerakan. Pemimpin juga harus mengartikulasikan kepada pihak luar tentang rasionalitas dan tujuan dari gerakan. Hal yang paling penting dari seorang pemimpin adalah ia mampu untuk menginspirasi orang lain untuk bertindak, dan mengajak orang-orang untuk mengikuti aksi gerakan mereka.

### 2) Citra Positif

Citra positif yang didapat oleh kelompok gerakan dari pihak luar dapat menjadi penunjang keberhasilan gerakan sosial. Kelompok gerakan sosial haruslah berusaha untuk meyakinkan semua pihak termasuk para politisi dan pemegang otoritas bahwa kelompok mereka memiliki tujuan yang baik. Citra publik tentang kelompok dan pemimpin kelompok gerakan harus positif karena hal tersebut akan memudahkan gerakan sosial untuk mendapatkan dukungan keyakinan publik (pengamat) bahwa gerakan tersebut bersifat rasional dan mulia.

### 3) Taktik yang Dapat Diterima secara Sosial

Suatu gerakan sosial akan berhasil apabila menggunakan taktik-taktik yang dapat diterima secara sosial. Taktik dan strategi yang dipilih haruslah dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sosial gerakan tersebut berada. Karena penggunaan taktik atau strategi yang tepat dapat memberikan dampak

terhadap munculnya rasa hormat dan citra positif dari masyarakat, dan kemudian akan mendapatkan dukungan dari masyarakat serta dapat menjadi sumber daya bagi kelompok gerakan sosial.

#### 4) Tujuan yang Dapat Diterima Secara Sosial

Suatu gerakan sosial harus berusaha untuk meyakinkan pihak pengamat (*bystander*) bahwa tujuan utama dari gerakan sosial tersebut adalah hanya untuk kepentingan masyarakat, dan tidak bermaksud merugikan kepentingan masyarakat. Gerakan juga dapat meyakinkan pihak-pihak tertentu bahwa pihak tersebut memiliki kepentingan atau keuntungan yang positif apabila gerakan sosial tersebut berhasil, sehingga kelompok gerakan sosial tersebut juga dapat memperoleh dukungan dari pihak luar dan memperbesar kekuatan politik mereka. Dengan demikian, suatu gerakan sosial akan mencapai keberhasilannya.

#### 5) Dukungan Politik dan Finansial

Suatu gerakan sosial akan mencapai keberhasilannya apabila kelompok gerakan tersebut juga memperoleh dukungan politik maupun finansial dari jaringan kelompok, organisasi, dan institusi lainnya. Kebanyakan gerakan sosial yang berhasil, akan berupaya untuk menjaga hubungan mereka agar tidak mengalami keterasingan dari pendukung politik maupun finansial mereka. Sementara gerakan yang tidak mampu menjaga hubungan baik dengan pendukung politik ataupun finansial mereka cenderung akan gagal dalam mencapai tujuan gerakan bahkan seringkali menyebabkan penarikan diri dari para partisipan.

Lima faktor penentu keberhasilan gerakan sosial menurut Locher diatas kemudian penulis jadikan sebagai landasan bagi penulis untuk meneliti keberhasilan dari gerakan yang dilakukan oleh LVC dalam mewujudkan ratifikasi UNDROP. Faktor-faktor tersebut penulis jadikan sebagai landasan karena pada dasarnya LVC memiliki tujuan dalam melakukan sebuah gerakan yaitu agar diciptakannya instrumen HAM yang baru yang lebih mengatur tentang hak-hak petani dan final dari gerakan LVC tersebut adalah dengan terwujudnya ratifikasi UNDROP sesuai dengan tujuan dari LVC itu sendiri. Dengan demikian gerakan dari LVC dapat dikatakan berhasil dan kemudian peneliti dapat meneliti tentang faktor-faktor yang menjadi penentu keberhasilan gerakan LVC tersebut dengan menggunakan lima indikator diatas menurut David A. Locher.

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berupaya melihat kebenaran-kebenaran namun di dalam melihat kebenaran tersebut, tidak selalu mampu didapat dengan melihat sesuatu yang nyata akan tetapi kadang kalau perlu pula melihat sesuatu yang bersifat tersembunyi dan melacaknya lebih jauh ke belakang sesuatu yang nyata tersebut. Metode penelitian kualitatif juga merupakan metode yang lebih bergantung pada data-data lingusitik dibanding data-data numerik yang kemudian digunakan dalam dalam analisa data. Meskipun begitu data numerik tetap di gunakan untuk membantu proses analisis.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Christopher Lamont, “*Research Methods In Internasional Relations*”, Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc.,2015, 78-79

Penelitian deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan, menjelaskan dan menginterpretasikan kondisi-kondisi kontemporer, penelitian ini fokus terhadap kondisi, praktek, stuktur dan perbedaan atau hubungan yang ada, opini serta proses yang sedang berlangsung atau menjadi trend pada waktu tertentu. Adapun penelitian deskriptif analisis tidak hanya berhenti pada deskripsi serta penjelasan tentang kondisi semata, namun juga melibatkan proses identifikasi dan interpretasi dari data-data yang telah dideskripsikan sebelumnya.

### **1.8.2 Batasan Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan batasan penelitian agar penelitian dapat dilakukan dengan lebih terfokus untuk menjawab pertanyaan penelitian. Batasan penelitian yang diambil oleh peneliti yaitu antara tahun 2008 hingga tahun 2018. Pengambilan batasan waktu pada penelitian ini dipilih oleh peneliti karena tahun 2008 merupakan waktu pertama kali LVC mengkampanyekan hak-hak petani di forum internasional hingga pada tahun 2018 gerakan dari LVC ini dapat berhasil dengan disahkannya UNDROP.

### **1.8.3 Unit Analisis dan Tingkat Analisis**

Unit analisis atau variabel dependen merupakan unit yang perilakunya diteliti atau dianalisis, sedangkan unit eksplanasi atau variabel independen merupakan unit yang mempengaruhi perilaku unit yang dianalisis. Dengan demikian dalam penelitian kali ini yang menjadi unit analisis atau variabel dependen peneliti adalah INGO yang mana dalam hal ini ialah LVC yang berhasil mewujudkan ratifikasi UNDROP. Sementara itu yang menjadi unit eksplanasi atau variabel independen adalah kebijakan liberalisasi pertanian yang dicanangkan oleh WTO dan cenderung merugikan petani. Selanjutnya, level analisis atau tingkat analisis merupakan

tingkat atau posisi dari objek kajian yang akan diteliti atau dianalisis. Dengan demikian peneliti menjadikan sistem internasional menjadi level analisis penelitian karena fenomena yang diteliti oleh peneliti merupakan fenomena yang mempengaruhi sebuah tatanan internasional dengan adanya ratifikasi UNDROP.

#### 1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data primer, peneliti menerapkan dua teknik dalam pengumpulan data, yang pertama yaitu wawancara dan yang kedua yaitu dengan melakukan studi kepustakaan atau *library research*. Dalam melakukan wawancara untuk penelitian ini, peneliti mewawancarai salah seorang responden ahli yang terlibat aktif dalam memperjuangkan ratifikasi UNDROP, yaitu Bapak Zainal Arifin Fuad yang merupakan Ketua Departemen Luar Negeri SPI, selain itu beliau juga tergabung ke dalam LVC Working Committee for Human Rights. Selain menggunakan teknik wawancara, peneliti juga menggunakan teknik *library research* untuk melakukan pengumpulan data. Dalam melakukan teknik *library research*, peneliti mengumpulkan data primer dari situs resmi LVC yaitu [viacampesina.org](http://viacampesina.org).

Dalam mengumpulkan data sekunder, penulis mengumpulkan data yang didapat dari penelitian-penelitian sebelumnya tentang LVC. Beberapa nama jurnal yang dapat penulis jadikan sebagai sumber data sekunder ialah seperti *Journal of Peasants Study*, *Journal of Rural Study*, *Journal of Agrarian Change*, dan masih terdapat lagi jurnal-jurnal yang lainnya dengan *Search Engine* yang penulis gunakan ialah La Via Campesina, United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas, *Liberalization*, dan *Rights of Peasants*.

### 1.8.5 Teknik Analisis Data

Untuk menjawab pertanyaan penelitian ini, peneliti melakukan analisis data dengan melalui beberapa tahap. Pertama adalah tahap pengelompokan data, pada tahap ini peneliti akan mengelompokan data-data yang sudah dikumpulkan kedalam beberapa kategori sesuai dengan alur penelitian ini. Kedua adalah tahap reduksi data, dalam tahap ini peneliti melakukan penyeleksian terhadap data-data yang tidak terlalu relevan dengan penelitian yang dianalisis agar dapat membantu menjawab strategi yang dilakukan oleh LVC dalam mewujudkan UNDROP. Ketiga adalah tahap analisis data, pada tahap ini peneliti menganalisis menggunakan lima faktor penentu keberhasilan suatu gerakan sosial menurut David A. Locher

- 1) Kepemimpinan yang Efektif ; Apakah kepemimpinan di dalam LVC memahami system hukum dan politik yang berfungsi efektif.
- 2) Citra Positif ; Apakah gerakan yang dilakukan oleh LVC mendapatkan citra positif dari publik atau pemegang kekuasaan.
- 3) Taktik yang Dapat Diterima secara Sosial ; Apakah taktik dalam gerakan sosial yang dilakukan oleh LVC dapat diterima oleh masyarakat.
- 4) Tujuan yang Dapat Diterima Secara Sosial ; Apakah tujuan dari gerakan yang dilakukan oleh LVC berhasil meyakinkan masyarakat.
- 5) Dukungan Politik dan Finansial ; Apakah gerakan yang dilakukan oleh LVC berhasil mendapatkan dukungan politik dan finansial dari jaringan kelompok, organisasi maupun institusi lainnya.

Lima faktor penentu keberhasilan gerakan sosial menurut Locher diatas kemudian penulis jadikan sebagai landasan bagi penulis untuk meneliti keberhasilan dari gerakan yang dilakukan oleh LVC dalam mewujudkan ratifikasi UNDROP. Faktor-faktor tersebut penulis jadikan sebagai landasan karena pada dasarnya LVC memiliki tujuan dalam melakukan sebuah gerakan yaitu agar diciptakannya instrumen HAM yang baru yang lebih mengatur tentang hak-hak petani dan final dari gerakan LVC tersebut adalah dengan terwujudnya ratifikasi UNDROP sesuai dengan tujuan dari LVC itu sendiri.

## **1.9 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan dimuat penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka sebagai bahan rujukan dan pembandingan penelitian, kerangka konseptual yang akan digunakan untuk menganalisis topik penelitian, metode penelitian, unit analisis dan tingkat analisis, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

### **BAB II DEKLARASI HAK-HAK PETANI DAN MASYARAKAT YANG BEKERJA DI PEDESAAN**

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang hal-hal yang melatar belakangi terbentuknya Deklarasi Hak-Hak Petani dan Masyarakat yang Bekerja di Pedesaan (UNDROP), dan alasan pentingnya deklarasi ini bagi petani. Selain itu, bab ini juga akan menjelaskan

tentang dinamika dalam proses ratifikasi UNDROP yang diperjuangkan oleh La Via Campesina (LVC).

### **BAB III LA VIA CAMPESINA SEBAGAI GERAKAN SOSIAL DALAM MEMPERJUANGKAN HAK PETANI**

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang hal-hal yang melatar belakangi terbentuknya La Via Campesina (LVC) hingga pada akhirnya LVC mampu menjadi sebuah gerakan akar rumput yang tersebar di berbagai negara. Tidak hanya itu, bab ini juga akan menjelaskan tentang rangkaian perjuangan yang dilakukan oleh LVC dalam memperjuangkan isu pertanian maupun hak-hak petani. Hal tersebut perlu dijelaskan oleh peneliti karena LVC merupakan aktor utama yang akan diteliti sehingga latar belakang LVC perlu diketahui.

### **BAB IV FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN LA VIA CAMPESINA DALAM MEWUJUDKAN RATIFIKASI UNITED NATIONS DECLARATION ON THE RIGHTS OF PEASANTS AND OTHER PEOPLE WORKING IN RURAL AREAS (UNDROP)**

Dalam bab ini peneliti menganalisis tentang faktor-faktor penentu keberhasilan LVC dalam menwujudkan ratifikasi UNDROP dengan menggunakan konsep faktor-faktor penentu keberhasilan gerakan social dari David. A Locher

### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini peneliti akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan juga memberikan saran untuk penelitian berikutnya yang serupa dengan penelitian kali ini.

